



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI MULATSIH
2. Jabatan : DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG
3. NHK : 790901

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.128.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/212 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/230 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 938.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 282.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V REI 2WD 2.0 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU5 1.8 E CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 134.450.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. 250.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.192.933.922

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.987.383.922

III. HUTANG Rp. 144.434.230

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.842.949.692

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.